

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM KOMUNIKASI POLITIK

Ria Wuri Andary¹, Khairunnisah Lubis²

Universitas Medan Area, Kota Medan, Indonesia.

Email Korespondensi: riawuriandary@staff.uma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to explore the concept of political marketing applied by village head candidates in village head elections. The location of this study is in the village of Marindal 1, Deli Serdang district. This paper uses a descriptive method in presenting data and conducting analysis. The results of this study found that village head candidates generally carried out the concept of political marketing, but the personality factor and the effectiveness of the political marketing concept became dominant in achieving a succession of wins in village head elections.

Keywords: *Communications of Politic, Strategy of Campaign, Election.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep marketing politik yang diterapkan calon kepala desa pada pemilihan kepala desa. Lokasi pada studi ini berada di desa Marindal 1 kabupaten Deli Serdang. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif dalam menyajikan data dan melakukan analisis. Hasil penelitian ini mendapatkan temuan calon kepala desa pada umumnya melakukan konsep marketing politik, namun faktor personalitas dan efektifitas konsep marketing politik menjadi dominan dalam mencapai sukseksi kemenangan di pemilihan kepala desa.

Kata Kunci: *Komunikasi Politik, Strategi Kampanye, Pemilu*

PENDAHULUAN

Pada kehidupan sehari-hari setiap manusia tidak akan pernah lepas dari komunikasi. Dari anak-anak hingga orang dewasa, dari orang-orang biasa di masyarakat hingga para pejabat di lembaga parlemen, semuanya membutuhkan komunikasi untuk mengekspresikan pemikiran dan kekhawatiran mereka tentang masalah apa pun yang mereka hadapi dalam hidup mereka. Komunikasi telah memungkinkan manusia untuk membahas berbagai masalah, membuat konstruksi sosial pada masalah tersebut dan membahayakan solusi untuk menghadapinya.

Komunikasi mengalami evolusi dari waktu ke waktu setelah evolusi peradaban manusia. Cara manusia berkomunikasi satu sama lain dan media yang mereka gunakan untuk komunikasi telah berevolusi dari waktu ke waktu. Sejak zaman dahulu hingga saat ini manusia telah mengembangkan metode dan media komunikasi. Metode komunikasi manusia terbatas pada komunikasi lisan, tatap muka, dan penulisan. Selain itu, media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan audiens yang lebih luas juga terbatas pada media komunikasi tradisional seperti sinyal asap dan merpati pembawa yang digunakan untuk menyampaikan pesan tulisan yang ditulis (Yeger, 2015). Sementara di zaman dahulu metode dan media untuk komunikasi sangat terbatas, di era sekarang ini mereka telah sangat bervariasi karena adanya kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi menyebabkan lahirnya media dan metode baru untuk komunikasi. Akibatnya, saat ini manusia tidak lagi sangat bergantung pada komunikasi lisan dan tertulis, tetapi sekarang berkomunikasi secara *online* menggunakan *platform* komunikasi di media sosial. Media sosial telah banyak digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Memang, telah digunakan untuk

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 9 Nomor 4 Juni 2023

komunikasi politik oleh anggota masyarakat, politisi, dan partai politik (Stieglitz, Brockmann, & Dang-Xuan, 2012).

Pada artikel ini membahas bahwa media sosial memainkan peran pendukung dalam memediasi komunikasi politik antara anggota masyarakat, politisi dan partai politik. Bersama dengan media tradisional, media sosial menyediakan jalan alternatif untuk komunikasi politik, membuatnya lebih langsung dan interaktif. Dengan menggunakan media sosial, anggota masyarakat kini dapat lebih mudah menargetkan pejabat publik dan politisi untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, dan kritik mereka atas isu dan agenda politik. Meskipun penggunaan media sosial untuk tujuan komunikasi politik memberikan manfaat bagi anggota masyarakat. Namun, itu juga memberikan kerugian bagi mereka sebagai pengguna platform media ini. Oleh karena itu penelitian ini akan secara kritis membahas penggunaan media sosial untuk komunikasi politik. Pertama, akan menguraikan apa itu media sosial, perbedaannya dari media tradisional, dan perannya dalam komunikasi politik. Kedua, itu akan mengatasi potensi keuntungan dan kerugian bagi audiens ketika politisi menggunakan platform media ini untuk memotong media tradisional. Sehingga, pada penelitian ini akan memberikan diskusi, pembahasan,serta kesimpulan terkait media sosial untuk komunikasi politik.

Salah satu contoh keberhasilan dalam upaya menggunakan media sosial untuk komunikasi politik adalah dalam pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 2008. Dalam pemilihan itu mantan presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama mengintegrasikan media sosial dalam strategi kampanye politiknya dan dilakukan secara efektif, dengan maksud untuk mendukung kampanye pemilu offline-nya. Hasilnya, Obama memenangkan pemilihan dan menjabat pada 2009 (Bogost, 2017). Sejak itu, menyusul kesuksesan Obama dengan media sosial, dapat disaksikan peningkatan penggunaan media sosial untuk komunikasi politik seperti dalam kampanye pemilihan presiden dan legislatif di banyak negara di seluruh dunia. Jika dibandingkan dengan Indonesia, sekarang ini hampir semua aspek komunikasi dalam politik didukung oleh media sosial seperti partai politik di Indonesia. Dimana sudah banyak yang memiliki akun *Facebook*, *Instagram*, *YouTube*, dan *Twitter* di samping *website* resmi parpol. Sementara politisi masing-masing memiliki juga akun pribadi seperti jajaran para menteri, bahkan akun *twitter* presiden RI Joko Widodo (@jokowi) berstatus *verified account*, yang artinya sudah mendapatkan verifikasi dari pihak *Instagram*. Di sisi *Twitter* seperti program kerja, pendapat mengenai isu terkini, atau pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya ringan, serta menanggapi *mention* dari masyarakat, adalah hal-hal yang umumnya tercantum dalam lini masa *Twitter* para tokoh politik tersebut.

Artikel ini sangat penting dilaksanakan dalam ranah akademis dan praktis mengenai tentang peran media sosial sebagai komunikasi politik. Artikel ini juga bisa dijadikan bahan referensi untuk dipraktikkan secara nyata. Maka dari itu, peneliti ini mereview bagaimana peran media sosial sebagai alat komunikasi politik.

METODE

Tulisan ini berjenis kualitatif dengan metode *literatur review* untuk mendalami permasalahan dalam tulisan ini. Pendekatan analisis deskriptif digunakan untuk medeskripsikan, menganalisa, dan menggambarkan suatu keadaan subyek atau obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penggunaan teori dari media sosial dan komunikasi politik akan menjadi panduan untuk menemukan jawaban dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

Media Sosial

Platform media sosial seperti *Facebook*, *MySpace*, *Twitter*, *YouTube*, dan *Wikipedia*, hanya untuk beberapa nama, bukanlah hal baru dalam menggunakan *platform* komunikasi media baru itu untuk berkomunikasi dan menjaga persahabatan dengan individu lain. (Bogost, 2017). Komunikasi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 9 Nomor 4 Juni 2023

tersebut tidak terbatas pada lingkaran teman mereka sendiri tetapi juga untuk pengguna media sosial yang lebih luas di komunitas yang berbeda, waktu yang berbeda, dan agenda yang berbeda. Meskipun media sosial telah mendapatkan popularitasnya di kalangan anggota publik dan sebagian besar juga dibahas dalam komunikasi dan sastra politik, namun tidak ada definisi tunggal mengenai media sosial (Effing, Van Hillegersberg, & Huibers, 2011). Namun, sebagian besar akademisi media komunikasi setuju bahwa media sosial dapat didefinisikan sebagai sekelompok aplikasi berbasis Internet yang dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan pembuatan dan pertukaran *User Generated Content* (Kaplan & Haenlein, 2010). Berdasarkan definisi itu, dapat disimpulkan bahwa media sosial sama sekali bukan platform komunikasi baru, namun merupakan pengembangan web 2.0 dan dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan penggunaannya untuk secara mandiri dan mudah menghasilkan, menyebarluaskan, mendiskusikan, dan bertukar berbagai informasi dengan pengguna lain. Karakteristik unik ini telah membuat platform media sosial menjadi begitu populer di kalangan pengguna komunikasi media.

Kelebihan dan Kekurangan Media Sosial

Media sosial telah berkontribusi positif terhadap perkembangan komunikasi politik dengan menyediakan platform baru yang memfasilitasi komunikasi politik yang lebih langsung dan interaktif (Nulty et al., 2016) karena membantu untuk meningkatkan komunikasi antara anggota masyarakat dan politisi. Salah satunya ialah media sosial telah membantu politisi untuk mendapatkan keuntungan politik daripada sistem komunikasi yang ditingkatkan. Peran media sosial politisi sekarang dapat melakukan kampanye politik dan komunikasi politik lainnya secara efisien dan efektif. Namun, meskipun peran media sosial untuk komunikasi politik memberikan manfaat bagi politisi, itu juga menghadirkan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian para politisi. Salah satu kemungkinan kerugian dari penggunaan media sosial bagi politisi adalah bahwa operasi media sosial membutuhkan keterampilan dan sumber daya yang memadai. Karena tidak semua politisi melek internet dan keterampilan komunikasi yang cukup, dengan demikian bisa sangat sulit bagi mereka untuk mengimbangi aplikasi media sosial (Howard et al., 2016). Selain itu, mengoperasikan media sosial juga memakan waktu. Sifat platform media sosial yang memungkinkan komunikasi dua arah akan memaksa politisi untuk mengalokasikan banyak waktu untuk menanggapi komentar dan posting audiens yang melimpah yang dapat menimbulkan kesulitan bagi politisi untuk menanggapi semua konten audiens. Untuk menghadapi masalah ini politisi kemudian cenderung menunjuk seseorang untuk memberikan tanggapan kepada audiens mereka yang menciptakan beban lain bagi sumber daya manusia dan manajemen (Howard et al., 2016). Kerugian lainnya adalah bahwa menggunakan media sosial sebagai media komunikasi politik di lingkup publik secara online yang akan membuat politisi memiliki kurang kontrol atas informasi yang tersedia tentang mereka di dunia maya (Kaplan & Haenlein, 2010). Hal tersebut akan membuat semakin sulit bagi politisi untuk mempertahankan citra positif mereka atas konstituen potensial karena pengguna media sosial mungkin dapat menghasilkan dan menyebarluaskan sebanyak mungkin informasi menyebarkan pada politisi ke saluran media sosial.

Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah komunikasi yang di arahkan kepada pencapaian suatu pengaruh, sehingga masalah yang di bahas oleh kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya dengan sanksi yang ditentukan bersama melalui lembaga politik. Rush dan Althoff (1997) mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses ketika informasi politik yang relevan ditentukan dari suatu bagian system politik ke bagian lainnya, dan diantara system social dengan system politik.

Menurut Luciana Pye, antara komunikasi dan politik atau pemerintahan memiliki hubungan yang erat dan istimewa karena berada dalam kawasan (*domain*) politik dengan menempatkan komunikasi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 9 Nomor 4 Juni 2023

pada posisi yang sangat fundamental. Glanoor misalnya mengatkan bahwa tanpa komunikasi tidak akan ada usaha bersama, dan dengan demikian tidak ada politik. Dalam pandangan Pye, bahwa tanpa suatu jaringan (komunikasi) yang mampu memperbesar (*enlarging*) dan melipatgandakan (*magnifying*) dan pilihan-pilihan individual, maka tidak akan ada namanya politik.

Beberapa definisi komunikasi politik yang bersifat linier menurut Lasswell adalah: 1. Transmisi informasi (secara luas mencakup verbal, nonverbal, perilaku, dsb) dalam mengejar kekuasaan (Sunshine Hilligus). 2. Transfer informasi apapun mengenai perlombaan atas sumber daya (Bruce Hardy) 3. Produksi, transmisi dan efek informasi mengenai politik, pendapat politik dan kebijakan publik. (Bob Lichter)

Definisi komunikasi politik yang bersifat sistematis (lihat Alfian, 1991) mengasumsikan realitas komunikasi politik sebagai sebuah system yang konstan, teratur dan dapat diramalkan misalnya sebagai:

- a. Pertukaran informasi mengenai pelaksanaan kekuasaan (Ken Goldstein)
- b. Interaksi antar elite, media warga negara mengenai topic-topik yang berkaitan dengan politik (Talia Stroud)
- c. Pertukaran gagasan dan pesan, verbal atau visual, secara langsung atau bermedia, dalam suatu ruang publik yang dapat diidentifikasi, yang tujuannya atau konsekwensiinya adalah untuk mengubah struktur dan produk pemerintahan atau menghindari perubahan tersebut. (Lynn Sanders)

Meriam Budiardjo (2008) memahami komunikasi politik sebagai salah satu fungsi partai politik, yaitu meyalurkan beragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa untuk di perjuangkan menjadi kebijakan politik. Sedangkan menurut Maswadi Rauf, mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintah, dan aktivitas komunikasi dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Komunikasi politik di bagi dalam dua dimensi yaitu kegiatan politik, penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kedua, kegiatan ilmiah, kegiatan politik dalam sistem politik.

Aplikasi media sosial yang beroperasi masih menimbulkan tantangan bagi anggota masyarakat karena masalah literasi. Faktor lain yang mungkin membatasi penggunaan media sosial adalah bahwa fakta platform media ini tidak sepenuhnya media gratis. Untuk mengoperasikan aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Telegram, misalnya, pengguna platform media sosial tersebut harus memiliki koneksi internet; dan untuk memiliki koneksi seperti itu tidak selalu gratis. Terakhir, penggunaan media sosial meningkatkan polarisasi di kalangan anggota masyarakat. Peran media sosial untuk komunikasi politik mendorong pembentukan kelompok dalam masyarakat berdasarkan ideologi dan preferensi politik. Hal ini disebabkan oleh pengguna media sosial cenderung menjalin persahabatan dan komunikasi dengan pengguna yang memiliki preferensi dan ideologi politik yang sama. Dari pembahasan tersebut ditemukan bahwa peran media sosial sebagai platform komunikasi politik memiliki kelebihan dan kekurangan bagi publik. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan bagaimana menghadapi kerugian dalam rangka meningkatkan manfaat peran media sosial bagi anggota politik masyarakat. Politisi harus mempertimbangkan menggabungkan media tradisional dan sosial sebagai media untuk komunikasi. Kombinasi kedua media kemungkinan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi politik.

KESIMPULAN

Setiap individu perlu berkomunikasi. Komunikasi telah memungkinkan individu untuk terus berinteraksi satu sama lain untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka dan memikirkan masalah dan kesulitan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Untuk berkomunikasi dengan lebih baik, manusia mengembangkan metode komunikasi dan media. Akibatnya, metode komunikasi dan media selalu berubah serta mengikuti perkembangan peradaban manusia. Di era sekarang ini, media komunikasi telah sangat bervariasi berkat perkembangan teknologi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 9 Nomor 4 Juni 2023

komunikasi. Perkembangan teknologi telah mendorong lahirnya komunikasi media baru. Komunikasi media baru seperti Web yang memiliki alternatif media komunikasi. Perkembangan terbaru pada teknologi berkomunikasi yaitu media sosial telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi publik. Jika dalam beberapa dekade terakhir, peran mediasi dan penyebaran informasi hanya pada media tradisional seperti media cetak, TV, dan radio, namun sekarang media sosial telah dapat menggantikannya. Peran media sosial saat ini tidak terbatas pada percakapan sehari-hari, tetapi telah diperluas ke komunikasi politik. Sifat interaktif dan fleksibel dari media sosial telah membuatnya sekarang banyak digunakan oleh baik anggota masyarakat, politisi, dan partai politik dalam komunikasi politik. Media sosial kini telah menjadi sarana utama untuk kampanye dan komunikasi politik. Namun, politisi harus bijak dalam menggunakan media sosial untuk komunikasi politik karena penggunaan komunikasi menengah ini menghadirkan beberapa kelebihan dan kekurangan, terutama bagi penonton. Menggabungkan media tradisional dan sosial untuk komunikasi mungkin menjadi solusi terbaik untuk menjaga keterlibatan dan komunikasi dengan audiens.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 1991. *Komunikasi Politik dan Sistem Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bogost, Ian. (2017). *Obama was too good at social media*. Dostupno Na: <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2017/01/did-america-need-a-social-mediapresident/512405/>[20. Listopada 2017.].
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Effing, Robin, Van Hillegerberg, Jos, & Huibers, Theo. (2011). *Social media and political participation: are Facebook, Twitter and YouTube democratizing our political systems?* International Conference on Electronic Participation, 25–35. Springer.
- Howard, Philip N., Savage, Saiph, Saviaga, Claudia Flores, Toxtli, Carlos, & Monroy-Hernández, Andrés. (2016). *Social media, civic engagement, and the slacktivism hypothesis: Lessons from Mexico's "El Bronco."* Journal of International Affairs, 70(1), 55–73
- Kaplan, Andreas M., & Haenlein, Michael. (2010). *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*. Business Horizons, 53(1), 59–68
- Lestaluhu, Said. 2017. "Bahan Ajar Komunikasi Politik." Retrieved April 28, 2022 (<https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/BAHAN-AJAR-KOMUNIKASI-POLITIK-dikonversi.pdf>).
- Nulty, Paul, Theocharis, Yannis, Popa, Sebastian Adrian, Parnet, Olivier, & Benoit, Kenneth. (2016). *Social media and political communication in the 2014 election to the European Parliament*. Electoral Studies, 44, 429–444.
- Rauf, Maswadi, *Indonesia dan Komunikasi Politik*, Gramedia Pustaka: Jakarta, 1993.
- Rush, Michael dan Philip Althoff. (1997). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Jakarta: Rajawa
- Stieglitz, Stefan, Brockmann, Tobias, & Dang-Xuan, Linh. (2012). *Usage Of Social Media For Political Communication*. PACIS, 22.
- Yeger, Herman. (2015). *The evolution of human communication*. Journal of Cell Communication and Signaling, 9(3), 289–290.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:

